



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2017-2021



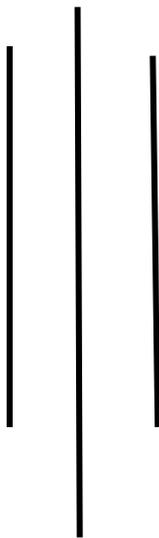
Pemerintah Kota Magelang

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang**

Jl. Alibasah Sentot P. No 6 Kota Magelang 56117 Telp. (0293) 368529



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
TAHUN 2017-2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG**

Jalan Ali basah Sentot P , No. 6 Kota Magelang 56117

Telp. (0293) 368529 Fax. (0293) 368540

<http://www.dinaspendidikan.magelangkota.go.id>

E-mail: diknas_kota_magelang@yahoo.co.id

Tahun 2017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Metode Penyusunan	6
E. Renstra SKPD dan Renstra KL RPJMD Propinsi dan Kota (khusus pendidikan)	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
B. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23
D. Tantangan dan Peluang Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40
B. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Walikota	42
C. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	46
D. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	48
E. Telaah RTRW dan Lingkungan Hidup Strategis	49
F. Penentuan Isu-Isu Strategis	51

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
A. Tujuan dan Sasaran	54
B. Strategi dan Kebijakan	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
A. Program	60
B. Kegiatan	63
C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	70
BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Magelang	71
BAB VII Penutup	
A. Program Transisi	73
B. Kaidah Pelaksanaan	73
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan mengacu pada Peraturan pemerintah tersebut di atas Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025. Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih 2016-2021.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang untuk kurun waktu 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat fleksibel, yang berarti bahwa bukan merupakan dokumen yang statis, sehingga apabila selama kurun waktu pelaksanaan ke depan terdapat perubahan peraturan yang lebih tinggi, Renstra dapat disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

Renstra ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata layanan di Kota Magelang. Tolok ukur yang digunakan pada dokumen ini, dapat dijadikan oleh masyarakat dan *stakeholders* pendidikan untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan.

Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang, semua pihak yang terkait dengan dokumen perencanaan ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang ini, atas nama institusi kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan gagasan serta pemikiran dalam rangka mewujudkan Renstra Perubahan ini. Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis Perubahan ini dapat menjadi acuan, rujukan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Tahun 2016-2021 ini memberikan manfaat yang besar bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

Renstra perubahan ini perlu dipahami oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Diharapkan Renstra perubahan ini akan bermanfaat bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan secara sinergis dan berkesinambungan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua.

Magelang, 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang



TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. 1

NIP. 19630403 198703 1 016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan dan kreatifitas masyarakat. Perlu disadari pula bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung kemandirian daerah, Pemerintah Kota Magelang dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan daerah dengan cermat, termasuk perencanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang, sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Berlakunya otonomi daerah diikuti pula dengan otonomi pendidikan dan budaya. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Sejalan dengan desentralisasi pendidikan dan kebudayaan, maka pembangunan pendidikan dan budaya di Kota Magelang diupayakan dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan terkoordinasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun

dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Dokumen Renstra tersebut menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun pada setiap tahunannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekaligus Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Magelang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah:

1. Maksud

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi dan program SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam

melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Magelang.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
- b. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;
- c. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan budaya di Kota Magelang;
- d. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

C. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang disusun dengan Landasan Peraturan Sebagai Berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
24. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 39/IX/6/8/2003 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Walikota Magelang No. 21 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah.
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
32. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050.11/14486 tanggal 14 Mei 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

D. Metode Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang disusun dengan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap persiapan

Kegiatan dimulai dengan pembentukan tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang melibatkan semua unsur yang ada di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang meliputi sekretariat dan 4 (empat) bidang. Penyusunan dimulai dengan rancangan awal, penyusunan draft, penyelarasan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dokumen resmi.

2. Tahap perumusan/penyusunan

Perumusan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2017-2021 mengacu pada rancangan awal RPJMD yang kemudian disusun dengan melalui proses pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan

SKPD, review Renstra K/L, penelaahan RTRW, dan perumusan isu-isu strategis.

Kegiatan Perumusan dan penyusunan Renstra antara lain:

- pemahaman akan surat edaran Walikota Magelang Nomor 050.11/411/310 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021
- perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna pencapaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
- Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD
- Pelaksanaan forum SKPD
- Penyajian Rancangan Renstra SKPD

3. Tahap verifikasi rancangan Renstra berisi

- penyampaian rancangan awal Renstra dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala BAPPEDA Cq. Tim Penyusun RPJMD perihal penyampaian Rancangan Renstra SKPD
- verifikasi rancangan Renstra
- Penyesuaian rancangan Renstra SKPD hasil verifikasi

4. Tahap Penetapan, setelah rancangan Renstra disesuaikan dengan hasil verifikasi tim Penyusun RPJMD, maka rancangan Renstra ditetapkan.

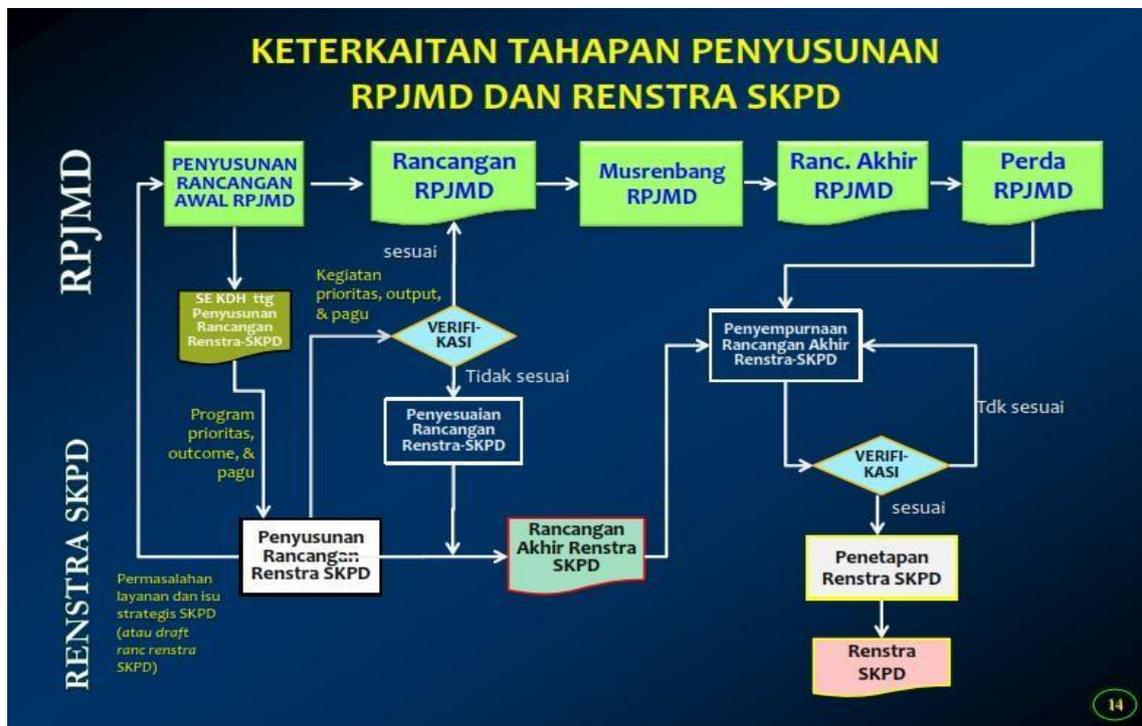
E. Renstra SKPD dan Renstra KL RPJMD Propinsi dan Kota (khusus pendidikan dan kebudayaan).

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang SPPN bahwa bagi setiap SKPD termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang wajib untuk menyusun Renstra Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang pendidikan. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 dan memperhatikan pula berbagai dokumen pembangunan lainnya, baik pada tingkat Pemerintah Kota Magelang, tingkat Provinsi Jawa Tengah, maupun tingkat Nasional. Hal ini perlu dilakukan agar pembanguaan pendidikan dan budaya Kota Magelang dapat sinergis dengan pembangunan pendidikan dan budaya pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang ini akan dijadikan landasan untuk menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap tahunnya, sehingga pembangunan pendidikan dan budaya dapat bersinergi dan berkesinambungan antar waktu. Disamping itu juga berimplikasi pada penyusunan prioritas program dan kegiatan serta penyusunan anggaran. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang juga dijadikan indikator keberhasilan dalam penilaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Magelang. Sebagai penjelasan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra KEMDIKBUD dan Renstra DINPENDIKBUD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Program
- 5.2 Kegiatan
- 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, disebutkan tentang **tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.** Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas dimaksud di atas, **fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** adalah:

- 1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kebudayaan;
- 2) Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Bidang Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kebudayaan.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan dasar.

Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendidikan dasar.

Kepala Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, kegiatan administrasi dan pembinaan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan PAUD dan Dikmas.

Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Kepala Bidang Kebudayaan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang kebudayaan.

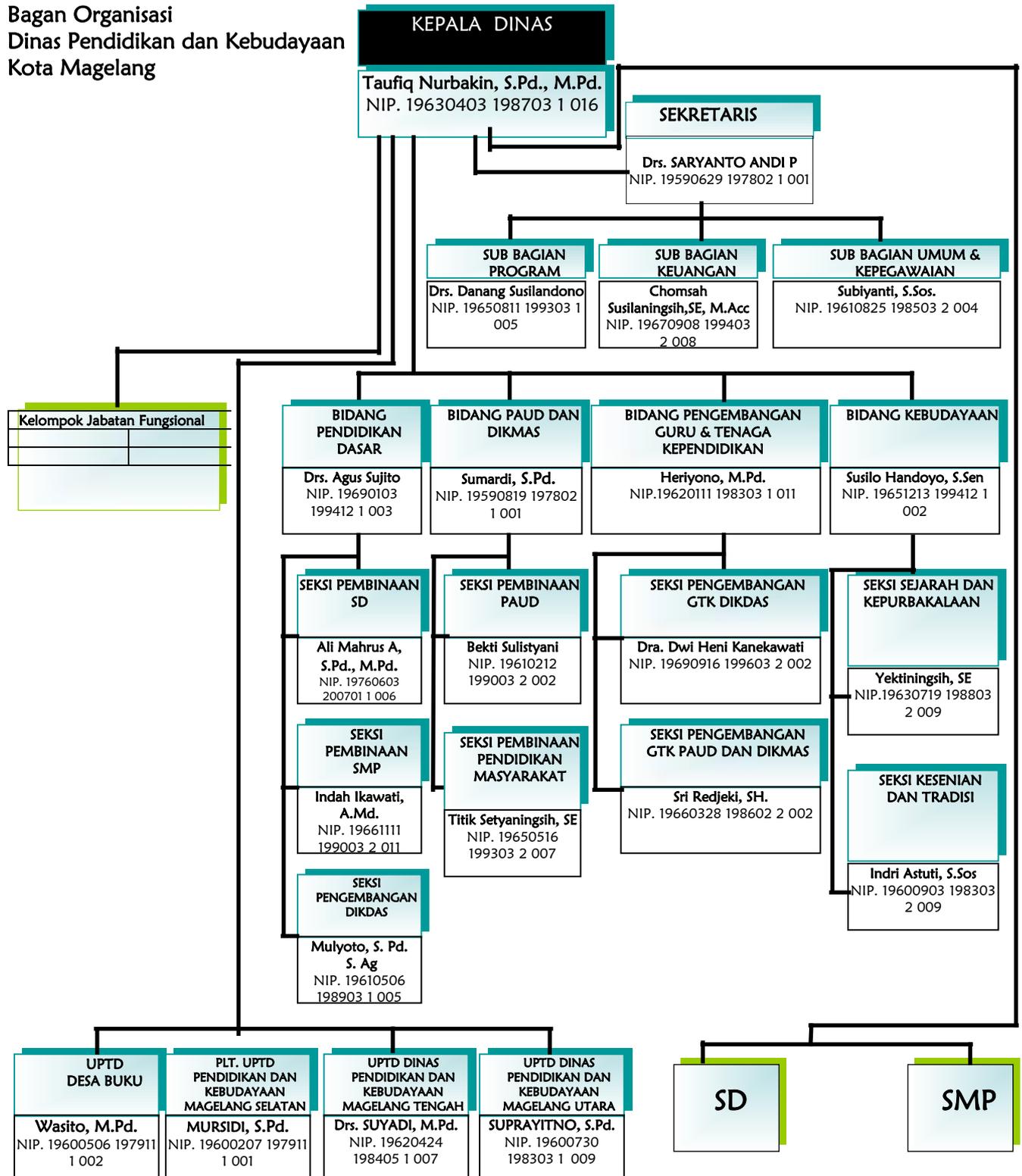
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kebudayaan.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Orgaisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



B. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting didalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi. Pegawai yang berkualitas akan menunjang tercapai tujuan organisasi. Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang berjumlah 90 orang dengan penggolongan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Menurut Golongan dan Kepangkatan Tahun 2016

No	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
I.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	17	34	8	60
1	Sekretariat	1	12	13	2	28
2	Bidang Pendidikan Dasar	0	2	6	2	10
3	Bidang Kebudayaan	0	2	4	1	7
4	Bidang PAUD dan Dikmas	0	1	6	1	8
5	Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	0	0	6	2	8
II.	Jab Fungsional	0	0	0	7	7
1	Pengawas TK	0	0	0	1	1
2	pengawas Tk.SD	0	0	0	4	4
3	Pengawas SMP	0	0	0	2	2
III.	UPT Desa Buku	0	2	3	1	6
IV.	UPT Magelang Selatan	0	2	2	1	5
V.	UPT Magelang Tengah	0	1	2	1	4
VI.	UPT Magelang Utara	0	3	4	0	7
	JUMLAH	1	25	46	18	90

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang tergolong pangkat III, kondisi ini membawa konsekuensinya yaitu perencanaan karir yang baik sehingga para pegawai mendapatkan posisi atau jabatan yang sesuai.

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	UNIT KERJA	JML ORG	TINGKAT PENDIDIKAN						
			SD	SMP	SMA	DIP	S1	S2	S3
I. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
1	Sekretariat	28		3	6	5	12	2	
2	Bidang Pendidikan Dasar	10			3	1	4	2	
3	Bidang PAUD dan DIKMAS	8			2	1	5		
4	Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	8			2		5	1	
5	Bidang Kebudayaan	7			2	1	4		
II. Jab Fungsional									
1	Pengawas TK	1					1		
2	pengawas SD	4						4	
3	Pengawas SMP	2						2	
III. UPT Desa Buku				1	1	1	2	1	
IV. UPT Magelang Selatan					2		3		
V. UPT Magelang Tengah				1	1		1	1	
VI. UPT Magelang Utara					5		2		
JUMLAH		90		5	24	9	39	13	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang jika dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berpendidikan lebih tinggi

dari SMA/SMK yang lebih banyak dari pada yang pegawai yang berpendidikan lebih rendah dari SMA/SMK. Kondisi ini dapat lebih mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik karena didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Namun, pada masa yang akan datang tingkat pendidikan pegawai harus lebih ditingkatkan, terutama bagi pegawai yang berpendidikan SMA/SMK, atau yang lebih rendah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tidak hanya memiliki pegawai yang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja namun juga tersebar sebagai pegawai diberbagai di tiga UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan UPT Desa Buku. Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah 90 orang pegawai. Untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlihat bahwa dari 90 orang pegawai tersebut sebagian besar bergolongan III b, III d. Kondisi ini menuntut perencanaan karir pegawai yang baik dimasa datang, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat memperoleh karir yang lebih baik.

2. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting didalam pencapaian tujuan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka upaya pencapaian tujuan tidak mungkin akan efektif.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Inventaris Perlengkapan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2017

No Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jml	Harga (ribuan)
1.	01	Tanah	4	16.042.150
2.	02	Jalan Dan Jembatan	-	-
3.	03	Bangunan Air	38	613.509
4.	04	Instalasi	-	-
5.	05	Jaringan	-	-
6.	06	Bangunan Gedung	23	4.038.569
7.	07	Monumen	-	19.025
8.	08	Museum	5	
9.	09	Alat-Alat Besar/Berat	2	24.898
10.	10	Alat-Alat Angkutan	46	1.665.188
11.	11	Alat-Alat Perbengkelan	-	-
12.	12	Pertanian	1	558
13.	13	Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	441	2.501.807
14.	14	Alat-Alat Studio/Alkon	72	267.191
15.	15	Alat-Alat Kedokteran	-	-
16.	16	Alat-Alat Laboratorium	61	220.107
17.	17	Buku/Perpustakaan	374	53.830
18.	18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	4	1.280
19.	19	Hewan/Ternak Dan Tumbuh-Tumbuhan	-	-
20.	20	Alat Persenjataan/Keamanan	-	118.030
		Jumlah Total	1.071	25.566.142

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang hanya memiliki 12 (dua belas) jenis barang/bidang inventaris, yaitu: 1) tanah, 2) bangunan air 3) bangunan gedung, 4) museum 5) alat-alat besar/berat, 6) alat-alat angkutan 7) pertanian 8) alat-alat kantor dan rumah tangga 9) alat-alat studio 10) alat-alat laboratorium dan 11) buku / perpustakaan 12) barang bercorak seni; yang total bernilai Rp 25.566.142.000,-

3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa minimal anggaran pendidikan adalah 20% dari total anggaran APBN dan APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting didalam kelangsungan masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu diperlukan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Magelang telah berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan tersebut dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2011

NO	BELANJA	TAHUN 2011(dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	538.185.928	197.233.386	36,64
2.	Belanja Tdk Langsung	300.085.017	148.946.046	49,63
3.	Belanja Langsung	238.100.911	48.287.340	20,28
	Total APBD : Dana Pendidikan	538.185.928	48.287.340	8,97
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			20,28

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2011 seluruhnya sebesar 36,64 %, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2011 mencapai sebesar 20,28 %.

Tabel 2.6
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2012

NO	BELANJA	TAHUN 2012 (dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	536,348,689	200.755.163	37,43
2.	Belanja Tdk Langsung	296,610,099	171.917.060	57,96
3.	Belanja Langsung	239,738,589	36.242.326	15,11
	Total APBD : Dana Pendidikan	536,348,689	36.242.326	6,75
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			15,11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2012 seluruhnya sebesar 37,43 %, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2012 sebesar 15,11 %.

Tabel 2.7
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2013

NO	BELANJA	TAHUN 2013 (dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	630,850,727	208.564.266	33,06
2.	Belanja Tdk Langsung	313,072,365	184.414.012	58,90
3.	Belanja Langsung	317,778,361	24.150.253	1,30
	Total APBD : Dana Pendidikan	630,850,727	24.150.253	3,82
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			1,30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2013 seluruhnya sebesar 33,06 %, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2013 hanya sebesar 1,30 %.

Tabel 2.8
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2014

NO	BELANJA	TAHUN 2014 (dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	682,223,870	236.727.614	34,69
2.	Belanja Tdk Langsung	340,526,165	202.765.643	59,54
3.	Belanja Langsung	341,697,705	33.961.971	9,93
	Total APBD : Dana Pendidikan	682,223,870	33.961.971	4,97
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			9,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2014 seluruhnya sebesar 34,69%, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 9,93 %.

Tabel 2.9
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2015

NO	BELANJA	TAHUN 2015 (dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	736,361,912	236.115.524	32,06
2.	Belanja Tdk Langsung	357,657,431	205.491.591	57,45
3.	Belanja Langsung	341,697,705	30.623.933	8,96
	Total APBD : Dana Pendidikan	736,361,912	30.623.933	4,15
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			8,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2015 seluruhnya sebesar 32,06%, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 8,96 %.

Tabel 3.0
Anggaran Pendidikan Kota Magelang Tahun 2016

NO	BELANJA	TAHUN 2016 (dalam ribuan)		
		APBD	Pendidikan	%
1.	Seluruhnya	1,024,554,369	251,947,989	24,59
2.	Belanja Tdk Langsung	432,348,738	219,519,651	50,77
3.	Belanja Langsung	585,118,631,	32,428,338	5,54
	Total APBD : Dana Pendidikan	1,024,554,369	32,428,338	3,16
	APBD-Belanja Pegawai : Dana Pendidikan			5,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dana sektor bidang pendidikan pada tahun 2016 seluruhnya sebesar 24,59%, jika dilihat dana untuk belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 5,54 %.

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam kerangka upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemajuan dan daya saing, perekonomian daerah, menanggulangi masalah pengangguran serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dan peningkatan produktifitas kerja, secara berkesinambungan Pemerintah Kota Magelang telah, sedang dan akan terus-menerus menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan. Sebagai "Kota Pendidikan" tidaklah berlebihan apabila di Kota Magelang banyak dibangun berbagai fasilitas pendidikan baik yang formal maupun non formal, jenjang TK, tingkat dasar (SD), tingkat menengah pertama (SMP), tingkat menengah atas (SMA dan SMK), dan SLB. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kota Magelang selengkapnya dapat dilihat pada paparan tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, dan Rombongan Belajar (Rombel)
Kota Magelang Tahun 2011-2015

JENJANG	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	75	75	75	75	75
	Jumlah Ruang Kelas	851	545	547	541	542
	· Rusak Berat	2	0	0	21	15
	· Rusak Ringan	59	13	91	93	34
	· Baik	790	532	456	427	493
	Jumlah Rombel	525	541	528	532	535
Madrasah Ibtidaiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	12	12	12	12	15
	· Rusak Berat	0	0	2	2	1
	· Rusak Ringan	4	4	2	2	4
	· Baik	8	8	8	8	10
	Jumlah Rombel	12	12	12	12	14
Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	20	20	22	21	21
	Jumlah Ruang Kelas	270	270	320	235	299
	· Rusak Berat	0	0	0	0	4
	· Rusak Ringan	15	15	11	21	28
	· Baik	255	255	309	214	267
	Jumlah Rombel	284	284	342	242	363
Madrasah Tsanawiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	39	39	43	43	45
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0
	· Rusak Ringan	0	0	0	0	3
	· Baik	39	39	43	43	42
	Jumlah Rombel	39	39	42	124	45
Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah	12	12	12	12	12
	Jumlah Ruang Kelas	167	167	179	82	210
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0
	· Rusak Ringan	3	3	0	0	23
	· Baik	164	164	179	82	187
	Jumlah Rombel	161	167	171	178	185
Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah	19	19	21	21	20
	Jumlah Ruang Kelas	244	244	239	251	249
	· Rusak Berat	0	0	6	5	1
	· Rusak Ringan	8	8	35	17	18
	· Baik	236	236	198	229	230
	Jumlah Rombel	271	244	300	293	309
Madrasah Aliyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	36	36	35	15	40
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0
	· Rusak Ringan	5	5	3	0	0
	· Baik	31	31	32	15	40
	Jumlah Rombel	36	36	38	40	41

Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

Di samping sarana prasarana fisik, ketersediaan dan kapasitas guru turut menentukan derajat kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru dipersyaratkan minimal S1/D4. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Komposisi guru di Kota Magelang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Guru SD	914	927	3.663	886	897
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>511</i>	<i>585</i>	<i>666</i>	<i>670</i>	<i>746</i>
02.	Guru MI	23	23	24	22	22
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>22</i>
	Jumlah	937	950	3.687	908	919
03.	Guru SMP	665	665	689	667	648
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>638</i>	<i>608</i>	<i>612</i>
04.	Guru MTs	87	87	88	93	96
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>82</i>	<i>88</i>	<i>94</i>
	Jumlah	752	752	777	760	744
05.	Guru SMA	449	449	844	937	454
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>428</i>	<i>428</i>	<i>628</i>	<i>923</i>	<i>438</i>
06.	Guru MA	85	85	87	81	84
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>74</i>	<i>72</i>	<i>76</i>
07.	Guru SMK	839	839	865	867	842
	<i>Lulusan S1/S2</i>	<i>772</i>	<i>772</i>	<i>803</i>	<i>815</i>	<i>792</i>
	Jumlah	1.373	1.373	1.796	1.885	1.380

Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

Dari ketersediaan sarana prasarana fisik beserta jumlah guru yang ada tersebut, selanjutnya dapat diketahui

rasio-rasio pendidikan di Kota Magelang sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Rasio-Rasio Pendidikan Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1						
1.1.	Jumlah gedung sekolah	77	77	77	77	77
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.765	11.765	11.765	11.765	11.043
1.3.	Rasio (per 10.000)	65,45	65,45	65,45	63,75	
2 SMP/MTs						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	22	22	24	23	23
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.714	6.714	6.714	6.714	5.800
2.3.	Rasio (per 10.000)	32,77	32,77	35,75	34,26	
	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR PER 10.000	53,57	53,57	54,66	53,03	54,66
3 SMU/SMK/MA						
3.1	Jumlah gedung sekolah	33	33	35	35	34
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.111	8.111	8.111	8.111	5.949
	Rasio (per 10.000)	40,69	40,69	43,15	43,15	43,15
KETERSEDIAAN GURU						
1 SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	937	950	3.687	908	919
1.2.	Jumlah Murid	15.407	15.597	15.239	15.126	14.960
1.3.	Rasio (per 10.000)	608,17	609,09	2419,45	600,29	
2 SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	752	752	777	760	744
2.2.	Jumlah Murid	10.186	10.186	10.691	11.010	8.694
2.3.	Rasio (per 10.000)	738,27	738,27	726,78	690,28	
	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR PER 10.000	659,95	660,12	1.721,56	638,20	
3 SMU/SMK/MA						
3.1	Jumlah Guru	1.373	1.373	1.796	1.885	1.380
3.2	Jumlah Murid	14.360	14.360	15.104	16.753	15.185
	Rasio (per 10.000)	956,13	956,13	1189,09	1125,17	
1						
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar	1.689	1.702	4.464	1.668	1.663

1.1	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar	863	557	559	553	801
1.2	Jumlah Murid Pendidikan Dasar	25.593	25.783	25.930	26.136	23.654
	Rasio (1/1.1)/1.2) per 10.000	0,08	0,12	0,31	0,12	

Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

Rasio-rasio pendidikan Kota Magelang tahun 2011-2015 yang dianalisis disini adalah: rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, rasio siswa per kelas, dan rasio kelas per ruang kelas. Semakin baik kondisi rasio pendidikan maka semakin menuju pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pelayanan pendidikan ditinjau dari sekolah, kelas, dan guru.

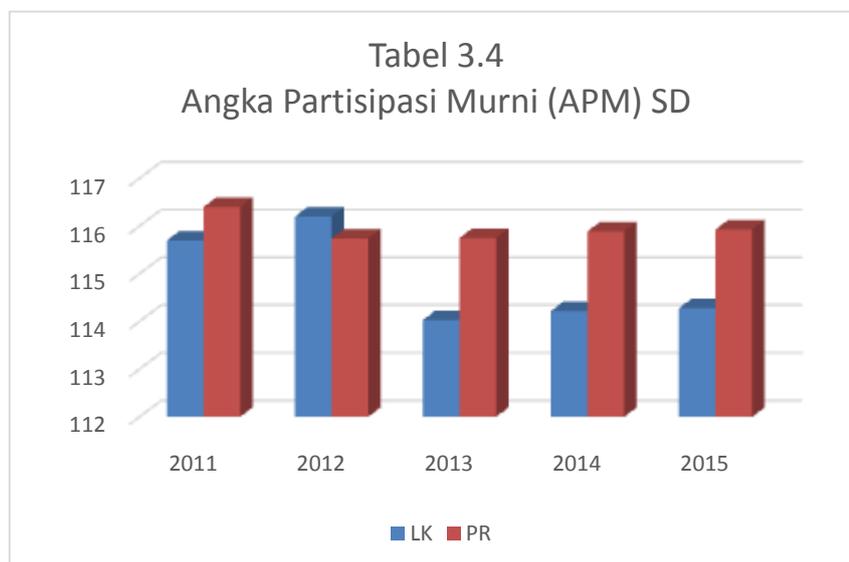
Pertama. Rasio siswa per sekolah, artinya satu sekolah menampung sejumlah siswa. Data menunjukkan bahwa rasio terbesar ada di SMK, kemudian secara berurutan diikuti oleh MTs, SMA, SMP, MA, SD, dan MI. Kedua. Rasio siswa per guru, artinya satu guru melayani beberapa siswa. Rasio terbaik pada saat tidak terlalu banyak siswa yang dilayani oleh seorang guru, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hubungan siswa dengan guru. Data menunjukkan bahwa rasio terbaik ada pada MI, kemudian secara berurutan diikuti oleh MA, SMK, SMA, MTs, SMP, dan SD. Ketiga. Rasio siswa per kelas, artinya jumlah siswa yang dapat ditampung pada sebuah kelas, semakin sedikit siswa (sesuai standar) dalam satu kelas, maka semakin baik pula proses belajar mengajar yang akan tercipta. Rasio siswa per kelas rata-rata masih di atas 30, kecuali untuk MI.

Keempat. Rasio kelas per ruang kelas, artinya berapa kelas (rombel) yang dapat dibentuk dari sebuah ruang

kelas, artinya semakin banyak rombel yang terbentuk dari sebuah ruang kelas, maka semakin optimal pemanfaatan (efisiensi) yang diperoleh.

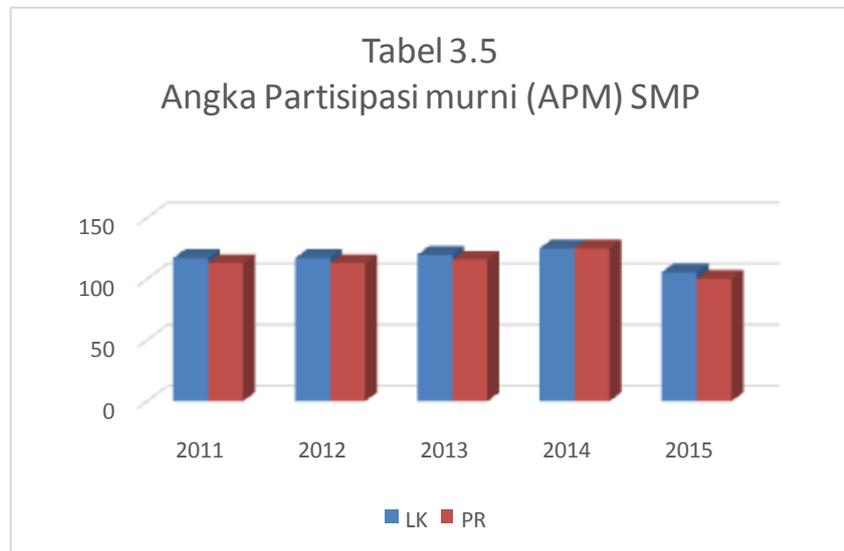
Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, salah satunya menggunakan alat ukur pencapaian IPG dan IDG. Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) mengukur kualitas hidup perempuan dengan meramu komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan Indeks Pembedayaan Perempuan (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* GEM menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Data pencapaian pembangunan responsif gender bidang pendidikan di Kota Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :



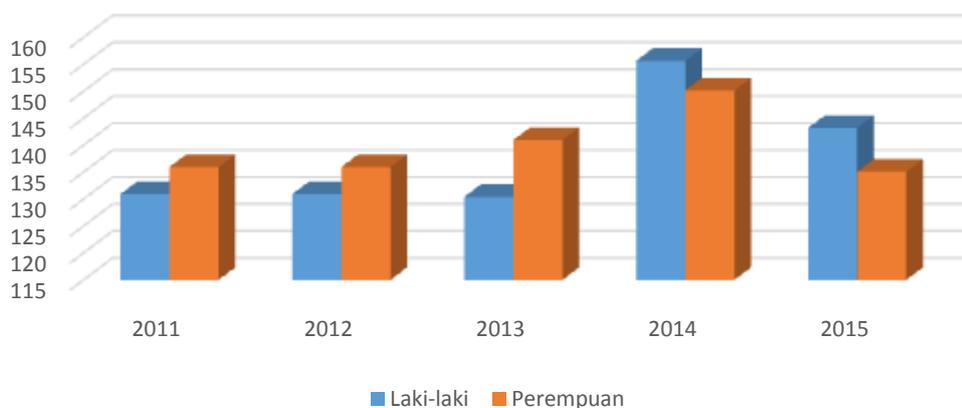
Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD. *Angka Partisipasi Murni* SD adalah persentase siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Kegunaan APM

adalah untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada Tahun 2011- 2015 APM Perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APM Laki-laki. Kecuali pada tahun 2012 APM Laki-laki lebih tinggi dibandingkan APM Perempuan.



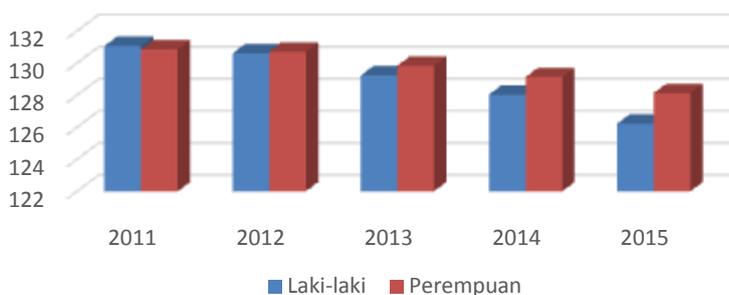
Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP. *Angka Partisipasi Murni* SMP adalah persentase siswa usia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Kegunaan APM adalah untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada Tahun 2011- 2015 APM Laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan APM Perempuan. Kecuali pada tahun 2014 APM Laki-laki lebih rendah dibandingkan APM Perempuan walaupun hanya selisih 0,07 %.

Tabel 3.6
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

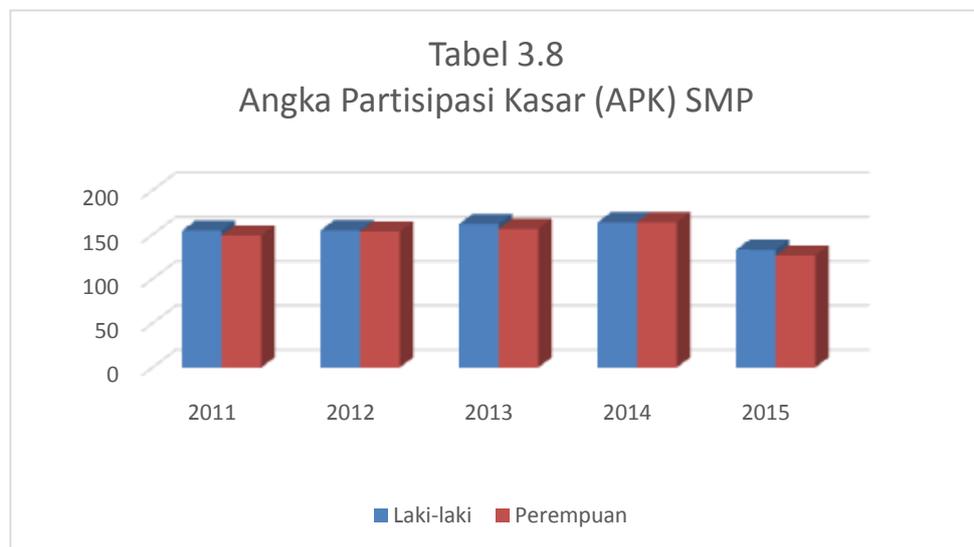


Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMA. *Angka Partisipasi Murni* SMA adalah persentase siswa usia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. Kegunaan APM adalah untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada Tahun 2011- 2013 APM Laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan APM Perempuan. Namun pada Tahun 2014-2015 APM Laki-laki lebih tinggi dibandingkan APM Perempuan.

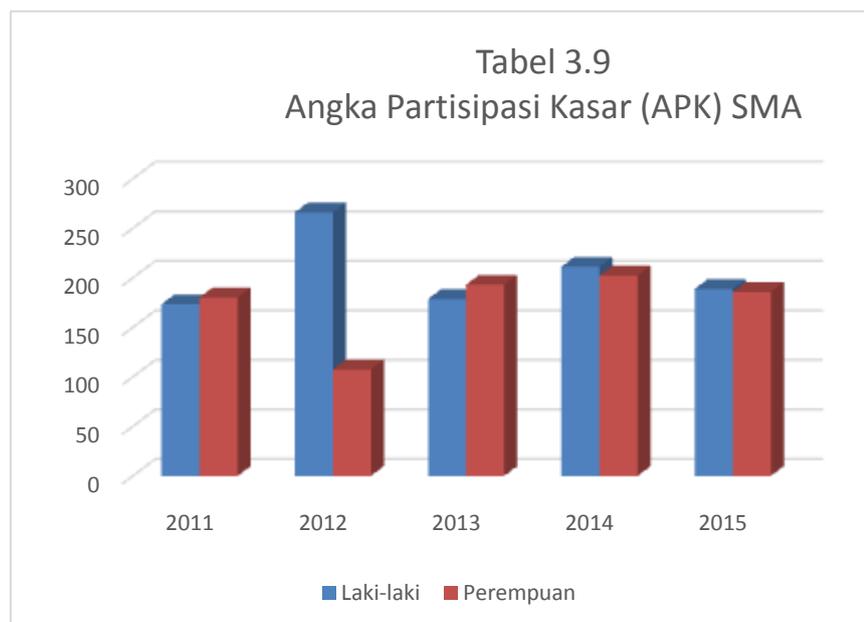
Tabel 3.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD



Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SD. *Angka Partisipasi Kasar (APK)* SD adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di jenjang SD terhadap jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada Tahun 2011 APK Laki-laki dan Perempuan ada kesenjangan 0,21%. Pada Tahun 2012 dan 2015 APK Perempuan lebih tinggi daripada Laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah siswa SMA perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah siswa laki-laki, walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan.



Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP. *Angka Partisipasi Kasar (APK)* SMP adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di jenjang SMP terhadap jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pada Tahun 2011-2015 APK Laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan APK Perempuan. Hal ini menunjukkan jumlah siswa Laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah siswa Perempuan, walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan.



Tabel di atas menyediakan informasi tentang Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMA. *Angka Partisipasi Kasar (APK)* adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di jenjang SMA terhadap jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. Pada Tahun 2011 APK Perempuan lebih tinggi dibandingkan APK Laki-laki. Kemudian pada tahun 2012 APK Laki-laki lebih tinggi dibandingkan APK Perempuan. Demikian pula pada tahun 2015 dimana APK Laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

APK di atas 100 % menunjukkan bahwa siswa-siswi yang bersekolah di Kota Magelang tidak hanya penduduk yang berasal dari Kota Magelang, namun juga berasal dari daerah sekitarnya, utamanya Kabupaten Magelang dan Kabupaten sekitarnya. Sehingga sebagai Kota Jasa di bidang Pendidikan, harus selalu mengutamakan mutu dan layanan pendidikan. Dengan demikian sekolah-sekolah di Kota Magelang selalu diminati oleh warga Kabupaten sekitar dari Kota Magelang.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis daerah, yang merupakan proses pemeriksaan lingkungan strategis (*environmental scanning*). Lingkungan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: lingkungan internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*), terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan; dan lingkungan eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*), terdiri atas faktor peluang dan faktor tantangan.

1. Lingkungan Internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Memiliki banyak sekolah yang menjadi tujuan tempat belajar masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya;
- 2) Tersedianya tenaga pendidik, pembiayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan;
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek pendidikan dalam perbaikan kehidupan dan kesejahteraan;
- 4) Tingginya minat dan partisipasi sebagian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan.

b. Kelemahan

- 1) Masih adanya kerusakan sarana prasarana pendidikan dasar dalam kondisi rusak sedang;
- 2) Tidak meratanya kualitas pendidikan pada tiap sekolah di Kota Magelang;
- 3) Anggapan masyarakat masih rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan;
- 4) Kurang optimalnya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan non formal;
- 5) Masih banyaknya guru yang belum bersertifikasi dan berstatus non PNS (Guru Tidak Tetap).
- 6) Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kota belum mencukupi kebutuhan.
- 7) Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
- 8) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan, dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal dan non formal.
- 10) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
- 11) Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif
- 12) Kompetensi kelulusan siswa (pendidikan vokasi) belum memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
- 13) Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1)
- 14) Belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang bekeadilan.
- 15) Kurangnya minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat.

2. **Lingkungan Eksternal**

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. **Peluang**

- 1) Besarnya perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan;
- 2) Semakin tingginya perhatian pemangku kepentingan pendidikan di Kota Magelang, termasuk adanya dukungan politis dari legislatif terhadap upaya pembangunan pendidikan;
- 3) Mulai adanya perhatian dan kontribusi nyata dari berbagai pihak terhadap pendidikan, melalui pemberian berbagai bantuan ke sekolah, dalam bentuk bea siswa, perbaikan bangunan, sumbangan buku, dan lain-lain;
- 4) Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah;
- 5) Adanya kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Magelang dalam Akselerasi Wajar Dikdas 9 Tahun;
- 6) Perhatian dan kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan di sekolah sudah cukup tinggi;
- 7) Pemerintah pusat dan Provinsi masih memberikan bantuan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi pembangunan pendidikan di Kota Magelang;
- 8) Masyarakat semakin kritis dan sadar mutu, sehingga muncul lembaga pendidikan swasta yang berkualitas sebagai mitra pemerintah.

b. **Tantangan**

- 1) Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar;

- 2) Banyaknya penduduk usia sekolah yang memilih sekolah ke daerah diluar Kota Magelang, karena menganggap kualitasnya lebih baik;
- 3) Rendahnya animo masyarakat kota untuk ke SMK;
- 4) Masyarakat yang terpaksa membayar tinggi biaya pendidikan, memungkinkan munculnya sikap skeptis terhadap program pemerintah dan kurang percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin biaya pendidikan bagi warganya;
- 5) Banyaknya sekolah negeri dan swasta yang menerapkan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga memberikan kesan adanya komersialisasi pendidikan;
- 6) Adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf dan bersikap apatis terhadap upaya pemerintah dalam program keaksaraan fungsional;
- 7) Sikap masyarakat yang "Sekolah Negeri Minded" mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi sekolah;
- 8) Masih cukup banyaknya warga kota yang tergolong miskin, yang menyekolahkan anak-anaknya dan menjadi beban sekolah/pemerintah Kota Magelang.

Jumlah penduduk Kota Magelang pada pertengahan tahun 2015 berjumlah 132.261, sedangkan pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 131.703 jiwa dari jumlah tersebut penduduk yang masih berusia sekolah sampai dengan pendidikan menengah, yaitu usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun berjumlah 22.792 jiwa atau 17,23% dari total jumlah penduduk.

*Tabel 3.10
Data Kependudukan Kota Magelang Tahun 2011-2015*

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	LUAS AREA (km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)
MAGELANG SELATAN	41.122	6,888	5.970
MAGELANG TENGAH	46.879	5,104	9.185
MAGELANG UTARA	36.626	6,128	5.977
TAHUN 2015	132.261	18,120	7.299
TAHUN 2014	131.703	18,120	7.268
TAHUN 2013	130.836	18,120	7.220
TAHUN 2012	130.955	18,120	7.227
TAHUN 2011	129.556	18,120	7.149
TAHUN 2010	124.149	18,120	6.851

Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu dimanfaatkan dengan optimal. Pada kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil, dan penduduk usia lanjut dengan populasi yang belum terlalu besar.

Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain.

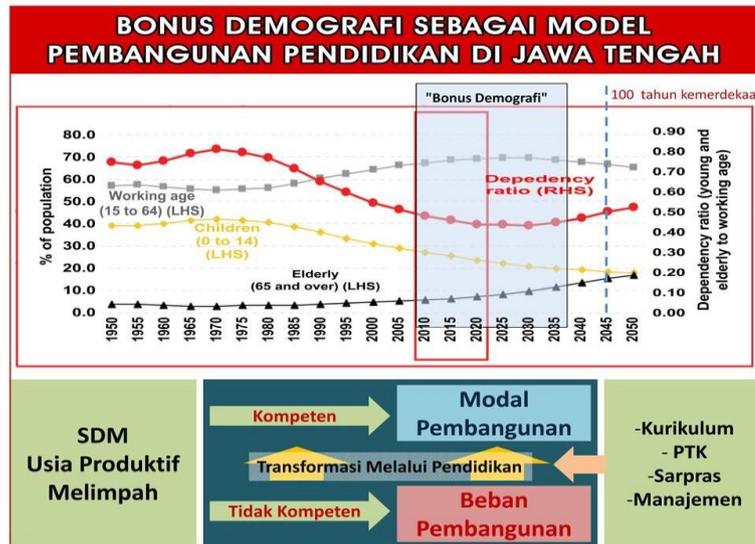
Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2020-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas.

Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut.

Guna menyongsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70 % dari jumlah penduduk usia produktif di tahun 2020-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata kunci untuk menyambut era bonus demografi dengan kesadaran *bahwa pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dan sebagai instrumen*

utama kemajuan bangsa harus menjadi prioritas pembangunan.

Tabel 3.11
 Bonus Demografi Sebagai Model
 Pembangunan Pendidikan Di Kota Magelang



BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga perlu dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, RTRWK serta KLHS.

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2016-2021, serta kendala-kendala yang dihadapi. Identifikasi Permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PERMASALAHAN
1	<p>BIDANG PAUD dan DIKMAS Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age); • Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; • Kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; • Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; • Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD : peserta didik; • Rendahnya mutu pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; • Belum tersedianya standar pengelolaan/manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; • Kurangnya tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
2	<p>BIDANG PENDIDIKAN DASAR Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas) antara lain disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar; • Belum meratanya mutu pendidikan dasar; • Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah; • Belum optimalnya pembinaan kesiswaan; • Belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar;
3	<p>BIDANG PGTK Kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan; • Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4; • Sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik; • Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

NO	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
4	BIDANG KEBUDAYAAN <ul style="list-style-type: none"> Kuatnya pengaruh nilai-nilai asing melalui berbagai media. Rendahnya kualitas SDM kesenian Lemahnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya Hilangnya jejak sejarah
5	SEKRETARIAT Kurangnya kepastian dan kualitas layanan pendidikan, yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan seluruh satuan dan disetiap jenjang pendidikan Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan layanan pendidikan; Berkurangnya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Belum meratanya SDM

B. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WALIKOTA

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2021, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021, yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota jasa	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.
Kota Modern	Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).
Kota Cerdas	Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) <i>Smart Governance</i> yaitu: pengembangan <i>e-governance</i> , ada partisipasi

UNSUR VISI	PENJELASAN
	masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) <i>Smart infrastructure</i> yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) <i>Smart Economy</i> , yaitu: pengembangan <i>city branding</i> , pengembangan kewirausahaan, pengembangan <i>e-commerce</i> , dan ekonomi kreatif; (4) <i>Smart environment</i> yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) <i>Smart people</i> yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) <i>Smart Living</i> yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Masyarakat Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pementapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Masyarakat Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2017-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Untuk penjabaran Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam beberapa Program Unggulan sebagai berikut:

1. Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
2. Program kota cerdas;
3. Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
4. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
5. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
6. Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
7. Program perluasan peluang kerjadalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
8. Program penguatan pertumbuhan ekonomi
9. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan

kemiskinan;

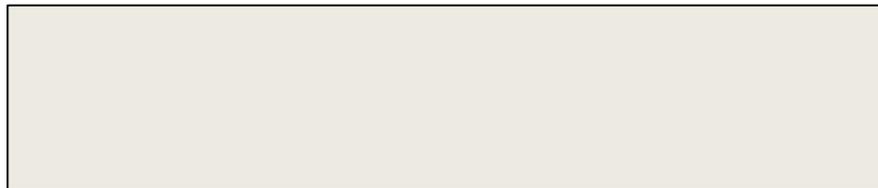
10. Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah.

11. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani

C. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:



Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif
2. Guru sebagai Penyemangat
3. Orangtua yang Terlibat Aktif
4. Masyarakat yang Sangat Peduli
5. Industri yang Berperan Penting
6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar
7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan

- pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

D. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

“Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan”

Makna Visi.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia

melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.

2. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standarpengelolaan
3. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
4. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.

D. TELAAH RT/RW DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemba-ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung program-program perwujudan rencana Indikasi Program, baik perwujudan rencana

struktur, perwujudan rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis Kota. Program-program yang berkaitan dengan Kawasan Peruntukan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Hasil Telaahan Pola dan Struktur Ruang Wilayah Kota Magelang
Untuk Kawasan Pendidikan

NO	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA					UTAMA	PENDUKUNG
			APBN	APBD PROV	APBD KOTA	HIBAH	BANTUAN		
KAWASAN PERUNTUKAN PENDIDIKAN									
a	Bantuan Manajemen Pengelolaan Sekolah	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perguruan Tinggi
b	Bantuan Teknik Pengelolaan Sekolah	Kota Magelang	V	V	V	V	V		Swasta
c	Bantuan Program Pengelolaan Sekolah		V	V	V	V	V		Lembaga Donatur
d	Pengembangan Kawasan dan Fasilitas Pendidikan Menengah Atas (SMA, SMK dan Sederajat)	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPU Swasta Lembaga Donatur
e	Pengembangan Kawasan dan Fasilitas Pendidikan Menengah Pertama (SLTP, Madrasah Tsanawiyah dan Sederajat)	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPU Swasta Lembaga Donatur
f	Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Dasar (SD, MI dan Sederajat)	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPU Swasta Lembaga Donatur
g	Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas Pelayanan Sekolah Luar Biasa	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta Lembaga Donatur
h	Pengembangan Kualitas dan Peningkatan Fasilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja Formal	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Disnakertransos	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Donatur
i	Pemeliharaan dan Pemantauan Rutin Sarana Kursus dan Pelatihan Kerja	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Disnakertransos	
j	Pemeliharaan Bangunan Sekolah	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
k	Peningkatan Kualitas/Mutu Pendidikan Melalui Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri, Teknologi dan Tenaga Pendidik	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BKD Swasta Lembaga Donatur
l	Pengembangan dan Optimalisasi Perpustakaan Daerah dan Desa Buku	Kota Magelang	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
m	Penyusunan Masterplan Pendidikan	Kota Magelang	-	-	V	-	-	Bappeda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
n	Penataan Lembaga Penunjang Jasa Pendidikan dan Bimbel	BIMBEL Kota Magelang	-	-	V	-	-	BP2T	DKPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ijin operasional dan akreditasi

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan prasyarat atau penentu agar berbagai isu strategis bidang pendidikan di Kota Magelang dapat dipecahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah:

1. Adanya komitmen bersama yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
2. Adanya anggaran yang tersedia guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Adanya sistem dan teknologi informasi pendidikan yang akurat guna mendukung Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Pendidikan.
4. Adanya dukungan masyarakat didalam pelaksanaan pendidikan.
5. Adanya dorongan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, yaitu:

- **Isu-isu Strategis Kelompok Kekuatan-Peluang**

- a. Manajemen sekolah dan Komite sekolah belum berfungsi optimal.
- b. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah.
- c. Adanya dikotomi sekolah negeri dan swasta

- **Isu-isu Strategis Kelompok Kekuatan-Tantangan**

- a. Belum terprogramnya Program Wajar 12 Tahun.

b. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan

• **Isu-isu Strategis Kelompok Kelemahan-Peluang**

- a. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik masih belum merata.
- c. Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.

• **Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Tantangan**

- a. Strategi Pengembangan Pendidikan yang belum berjalan optimal.
- b. Lemahnya data atau sistem informasi pendidikan.
- c. Desentralisasi pendidikan belum diikuti dengan anggaran yang memadai
- d. Masih tingginya beban biaya sekolah yang ditanggung pemerintah.

Berdasarkan pada penguraian isu-isu strategis pendidikan berdasarkan pada berbagai kelompok isu, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis utama bidang pendidikan Kota Magelang sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sistem informasi pendidikan.
- b. Strategi pengembangan pendidikan yang belum berjalan optimal.
- c. Kualitas sarana prasarana sekolah masih belum merata.
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia pendidik masih belum merata.
- e. Manajemen sekolah dan Komite Sekolah belum berfungsi optimal.
- f. Akses pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh keluarga miskin (gakin).

- g. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah.
- h. Desentralisasi pendidikan belum diikuti dengan anggaran yang memadai
- i. Relevansi pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.
- j. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- k. Masih kurangnya daya tarik sekolah yang ada.
- l. Masih tingginya beban biaya sekolah yang ditanggung pemerintah.
- m. Adanya dikotomi sekolah negeri dan swasta.
- n. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- o. Belum optimalnya ketersediaan dan Kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)
- p. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- q. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Magelang “Magelang sebagai Kota Jasa Yang Modern Dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera Dan Religius” dan misi Kota Magelang nomor 2 dan 4 yaitu :

1. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
2. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

maka ditetapkan tujuan dan sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang hendak dicapai organisasi yang dihasilkan secara kolektif dan menggambarkan strategi dalam melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka pendek.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Untuk Tujuan dan Sasaran diuraikan sebagai berikut :

- 1. Tujuan :** Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang merata, terjangkau dan bermutu.

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Pendidikan Masyarakat.

2. Tujuan : Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau .

Sasaran : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar.

3. Tujuan : Meujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) guru dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

4. Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya serta penyelenggaraan pelayanan di bidang kebudayaan

Sasaran: Terwujudnya masyarakat yang apresiatif serta terlibat dalam usaha pelestarian dan pengembangan seni budaya peninggalan purbakala;

5. Tujuan : Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran :

- a. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan.

- c. Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Agar Dinas Pendidikan lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata, berkualitas dan terjangkau.

a. Strategi :

- 1) Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengembangan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, dan pembinaan siswa.
- 2) Perluasan Layanan Pendidikan Masyarakat melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat, implementasi kurikulum dan pengayaan sumber belajar.

b. Kebijakan :

- 1) Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu.
- 2) Mengembangkan Program Jaring Garap dan penyediaan akses layanan pendidikan keaksaraan

2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas.

a. Strategi :

Peningkatan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS), melalui pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar.

b. Kebijakan :

Mendayagunakan semua potensi layanan pendidikan dasar (DIKDAS)

3. Meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga kependidikan yang setara.

a. Strategi :

Peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Kebijakan :

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

4. Melaksanakan pengumpulan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang kebudayaan

a. Strategi :

- 1) Optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya.
- 2) Meningkatkan pelestarian budaya.

b. Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pengembangan nilai-nilai sejarah.
- 2) Meningkatkan pengembangan kesenian dan tradisi.

- 3) Meningkatkan pengembangan dan pemantauan operasional kegiatan museum, sanggar dan kelompok/organisasi seni budaya.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan cagar budaya serta melaksanakan perlindungan cagar budaya.
- 5) Mengembangkan Kepurbakalaan dan nilai-nilai kesejarahan.

5. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

a. Strategi :

- 1) Peningkatan Layanan Pendidikan Berkelanjutan melalui program Pendidikan Kepramukaan, Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa.
- 2) Penguatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif, melalui pengembangan data dan sistem informasi pendidikan, penguatan perencanaan, citra publik dan akreditasi.
- 3) Peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur.

b. Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa di bidang pendidikan.
- 2) Mendayagunakan sumber daya untuk mendukung penguatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif dan pendidikan karakter
- 3) Mendayagunakan sumber daya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran dari sasaran dan tujuan yang akan dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang selama kurun waktu perencanaan. Sedangkan kegiatan adalah rincian/penjabaran dari program, yaitu berbagai aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang selama kurun waktu perencanaan.

A. PROGRAM

Program pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Usia Dini

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun, APK PAUD 0-6 tahun, dan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.

2. Program Pendidikan Dasar

Indikator yang akan dicapai yaitu : APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B; Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/MTs; Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/SMPLB/MTs, Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs; persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013.

3. Program Pendidikan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu : Angka Kelulusan Paket A, B, C; persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B; persentase buta aksara usia > 15 tahun; persentase lembaga Pendidikan Masyarakat Unggulan dan Lembaga Pendidikan Masyarakat yang terakreditasi.

4. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase guru PAUD, SD, SMP, yang berkualifikasi S1/D4; dan persentase guru PAUD, SD, SMP sederajat yang bersertifikat pendidik.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase SD, SMP yang terakreditasi; persentase SD, SMP yang melaksanakan MBS dengan baik.

6. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase terciptanya laporan keuangan yang akuntabel

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase terciptanya layanan perpustakaan

8. Program Pengembangan nilai budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase terlaksananya program kebudayaan.

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase terciptanya laporan keuangan yang akuntabel

10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase terlaksananya program kebudayaan

11. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase siswa pendidikan dasar yang berprestasi baik di tingkat kota, provinsi dan nasional.

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya sarana prasarana perkantoran yang memadai

14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kegiatan seni budaya di Kota Magelang

15. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya promosi

potensi seni budaya di Kota Magelang

16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersusunnya perda pendidikan

B. KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

1. **Program Pendidikan Anak Usia Dini**, yang meliputi :
 - a. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 - b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
 - f. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
 - g. Lomba Semarak Anak
 - h. Pelatihan Tenaga Kependidikan PAUD
 - i. Penyediaan Operasional PAUD
2. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar**, yang meliputi :
 - a. Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary
 - b. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah
 - c. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

- d. Penyelenggaraan paket A setara SD
 - e. Penyelenggaraan paket B setara SMP
 - f. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
 - g. Tes pengendali mutu SD
 - h. Tes pengendali mutu SMP
 - i. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)
 - j. Penyediaan sarana prasarana Pendidikan SMP (DAK)
 - k. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri se Kota Magelang
 - l. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri se Kota Magelang
 - m. Pengadaan Komputer Sekolah
3. **Program Pendidikan Non Formal**, yang meliputi :
- a. Kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
 - b. Kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
 - c. Kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup
 - d. Kegiatan pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM
 - e. Kegiatan Pelaksanaan Pra UN Paket C
 - f. Kegiatan Pelaksanaan UN Paket B dan C
 - g. Kegiatan pelatihan program PARENTING EDUCATION bagi pendidik PAUD
 - h. Kegiatan Pelaksanaan Pra UNPK
 - i. Kegiatan replikasi kelurahan vokasi
 - j. Kegiatan pelatihan kursus
 - k. Penyelenggaraan Paket C

4. **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, yang meliputi :
 - a. Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik
 - b. Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
 - c. Kegiatan pembinaan MGMP SMP
 - d. Kegiatan pembinaan KKPS
 - e. Kegiatan pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah
 - f. Kegiatan workshop manajemen perencanaan terpadu
 - g. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
 - h. Kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
 - i. Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
 - j. Kegiatan pendataan dan entri nilai peserta Ujian Nasional
 - k. Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK
 - l. Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru
 - m. Peningkatan Kompetensi Guru
 - n. Guru Pembelajar
 - o. Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru

5. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**, yang meliputi :
 - a. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
 - b. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kegiatan penerimaan siswa baru
 - d. Pemberian bantuan beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah
 - e. Kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi DAK Pendidikan (DAK)
 - f. Kegiatan sidak pelajar

- g. Kegiatan pelaksanaan asistensi APBS
- h. Kegiatan manajemen dan administrasi keuangan sekolah
- i. Kegiatan pendataan dan penyusunan RK SM/SD/TK
- j. Kegiatan manajemen pengelolaan ICT center
- k. Kegiatan penyusunan buku selayang pandang
- l. Kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah
- m. Kegiatan pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan
- n. Kegiatan penyusunan kalender pendidikan
- o. Kegiatan manajemen pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
- p. Kegiatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan
- q. Kegiatan akreditasi sekolah
- r. Kegiatan koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS
- s. Fasilitasi dan koordinas pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan
- t. Kegiatan pendataan pendidikan berbasis masyarakat
- u. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA

6. **Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**, yang meliputi:

- a. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD
- b. Kegiatan Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP
- c. Kegiatan LCC Dokter Kecil
- d. Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SD/SMP
- e. Kegiatan Pelaksanaan Pra US SD
- f. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Sekolah SD
- g. Kegiatan Pelaksanaan Pra UN SMP
- h. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SMP
- i. Kegiatan Olimpiade Olahraga dan Seni siswa Nasional

SD/SMP/SMPLB

- j. Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Karakter SMP
- k. Lomba Kader KEsehatan Remaja
- l. Kegiatan Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi :

- a. Kegiatan jasa surat menyurat
- b. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Kegiatan penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap
- o. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian

- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**
yang meliputi :
- a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 9. Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b. Penyusunan program prognosis realisasi anggaran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan rencana kerja OPD
 - e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD
 - f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP OPD)
- 10. Progran Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**
- a. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
 - b. Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)
 - c. Pengolahan bahan pustaka desa buku
 - d. Grand even desa buku
 - e. Peningkatan pelayanan desa buku
- 11. Program Pengembangan Nilai Budaya**
- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
 - b. Pemberian dukunagn, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya
 - c. Lomba kesenian dan kebudayaan
- 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- a. Peningkatan manajemen asset/barang daerah

- b. Manajemen pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah

13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air
- c. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- d. Pengembangan nilai dan geografis sejarah
- e. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
- f. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- g. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
- h. Pengembangan data base system informasi sejarah purbakala

14. Program pengelolaan keragaman budaya

- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- b. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
- c. Fasilitasi perkembangan, keragaman budaya daerah
- d. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

15. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- a. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

16. Program Penataan Peraturan Perundang undangan

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah
- b. Penyusunan rancangan peraturan walikota

C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk Target Capaian Indikator masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan untuk setiap tahun, lengkap dengan rencana anggaran yang akan dialokasikan sebagaimana pada tabel 5.1. dan 5.2 dibawah ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA MAGELANG

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang menyelenggarakan program-program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang terpilih.

Target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah melalui program-program sebagai berikut ini :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pembinaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

12. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13. Program Pengembangan nilai budaya
14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
15. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
16. Pprogram Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini :

BAB VII

PENUTUP

A. Program Transisi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 merupakan rencana lima tahunan yang merupakan program pembangunan yang berkelanjutan. Renstra 2016 – 2021 merupakan lanjutan dari Renstra 2011 – 2015 dan akan diteruskan dengan Renstra 2022 – 2027. Tahun 2016 adalah merupakan tahun transisi, dimana Renstra 2016 – 2021 belum ditetapkan namun SKPD tetap harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga tahun 2022, merupakan tahun transisi, dimana Renstra tahun 2022 – 2027 belum ditetapkan.

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan tersebut, maka perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra SKPD berakhir.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara

konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan komitmen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra SKPD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, berkewajiban untuk menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang berkewajiban menjamin konsistensi antara program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang juga telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050.11/14486 tanggal 15 Mei 2014 sebagai acuan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, aset dan anggaran yang sangat besar, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam, melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis untuk kurun waktu 2016-2021, sehingga dokumen Renstra ini merupakan suatu kesatuan dari dokumen perencanaan lainnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, tidak hanya tergantung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, namun juga tergantung pada dukungan atau partisipasi dari segenap pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Magelang, dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang ini diharapkan pelaksanaan pembangunan pendidikan akan terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencapai peningkatan kualitas SDM, khususnya di Kota Magelang.

Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan. Kiranya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2021 ini bermanfaat bagi

semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang maupun stakeholders pendidikan dan kebudayaan.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
TARGET, SASARAN, INDKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata, terjangkau dan bermutu	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) APK PAUD/TK (4-6 th)
			2) APK PAUD (0-6 th)
			3) % lembaga PAUD yang terakreditasi
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	1) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A
			2) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B
			3) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C
			4) Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
2	Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)	6) Persentase Lembaga PNF Unggulan
			7) Persentase Lembaga PNF Terakreditasi
			1) % APK SD/SDLB/MI/Paket A
			2) % APM SD/SDLB/MI/Paket A
			3) % APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B
			4) % APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B
3	Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	5) Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
			6) Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
			7) Angka Kelulusan SD/MI
			8) Angka Kelulusan SMP/MTs
			9) Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI
			10) Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTs
			11) % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional
			12) % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar
			13) % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar
			14) % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar
			15) % SD/MI yang memiliki sanitasi layak
			16) % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak
			17) % SD yang melaksanakan kurikulum 2013
			18) % SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013
3	Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	1) Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4
			2) Prosentase Pendidik SD berkualifikasi S1/D4
			3) Prosentase Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4
			4) Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik
			5) Prosentase Pendidik SD bersertifikat pendidik
			6) Prosentase Pendidik SMP bersertifikat pendidik

4	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya serta penyelenggaraan pelayanan di bidang kebudayaan.	Terwujudnya masyarakat yang apresiatif serta terlibat dalam usaha pelestarian dan pengembangan seni budaya peninggalan purbakala	1) Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang
			2) Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan
			3) Cakupan kajian seni
			4) Cakupan fasilitas seni
			5) Cakupan gelar seni
			6) Misi kesenian
			7) Cakupan sumber daya manusia kesenian
			8) Cakupan tempat
			9) Cakupan organisasi
			10) Jumlah grup seni budaya yang ditampilkan dalam festival/ event budaya
			11) Jumlah festival seni dan budaya.
			12) Persentase cagar budaya yang dilestarikan
			13) Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya
			14) Persentase sejarah yang didokumentasikan
			15) Jumlah pengunjung museum
			16) Jumlah koleksi museum
			17) Jumlah kerjasama dan promosi budaya
			18) Jumlah gedung kesenian
			19) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
5	mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter	terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan	1) % sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan
			2) % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka
			3) % SD yang terakreditasi
			4) % SMP yang terakreditasi
			5) % SD melaksanakan MBS dengan baik
			6) % SMP melaksanakan MBS dengan baik
		Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan	1) Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
			Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana aparatur
		1) % Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran yang memadai	
		2) % Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
1	Mewujudkan aparatur dan pelayanan publik yang profesional	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi	100%	100%	2.215.708	100%	2.215.708	100%	2.215.708	100%	2.215.708	100%	2.215.708		
			1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	600 surat	600 surat	504	600 surat	504	600 surat	504	600 surat	504	600 surat	504		
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	224.980	12 bulan	224.980	12 bulan	224.980	12 bulan	224.980	12 bulan	224.980		
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	48 unit	48 unit	26.200	48 unit	26.200	48 unit	26.200	48 unit	26.200	48 unit	26.200		
			4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	137 orang	137 orang	842.581	137 orang	842.581	137 orang	842.581	137 orang	842.581	137 orang	842.581		
			5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	90%	90%	168.672	90%	168.672	90%	168.672	90%	168.672	90%	168.672		
			6. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 item	47 item	80.000	47 item	80.000	47 item	80.000	47 item	80.000	47 item	80.000		
			7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 item	15 item	71.030	15 item	71.030	15 item	71.030	15 item	71.030	15 item	71.030		
			8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 item	18 item	9.622	18 item	9.622	18 item	9.622	18 item	9.622	18 item	9.622		
			9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 item	4 item	5.970	4 item	5.970	4 item	5.970	4 item	5.970	4 item	5.970		
			10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	458 eks	458 eks	17.768	458 eks	17.768	458 eks	17.768	458 eks	17.768	458 eks	17.768		
			11. Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.400	1 Tahun	2.400	1 Tahun	2.400	1 Tahun	2.400	1 Tahun	2.400		
			12. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	129.480	1 Tahun	129.480	1 Tahun	129.480	1 Tahun	129.480	1 Tahun	129.480		
			13. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11140 kali/orang	11140 kali/orang	387.545	11140 kali/orang	387.545	11140 kali/orang	387.545	11140 kali/orang	387.545	11140 kali/orang	387.545		
			14. Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	10 orang	10 orang	229.668	10 orang	229.668	10 orang	229.668	10 orang	229.668	10 orang	229.668		
			15. Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian	1 kegiatan	1 kegiatan	19.288	1 kegiatan	19.288	1 kegiatan	19.288	1 kegiatan	19.288	1 kegiatan	19.288		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	797.207	100%	797.207	100%	797.207	100%	797.207	100%	797.207		
			1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	200 meter	200 meter	40.350	200 meter	40.350	200 meter	40.350	200 meter	40.350	200 meter	40.350		
			2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	55.600	1 kegiatan	55.600	1 kegiatan	55.600	1 kegiatan	55.600	1 kegiatan	55.600		
			3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48 unit	48 unit	584.112	48 unit	584.112	48 unit	584.112	48 unit	584.112	48 unit	584.112		
			4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31 item	31 item	68.000	31 item	68.000	31 item	68.000	31 item	68.000	31 item	68.000		
			5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	108 unit	108 unit	49.145	108 unit	49.145	108 unit	49.145	108 unit	49.145	108 unit	49.145		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	110.934	100%	110.934	100%	110.934	100%	110.934	100%	110.934		
			1. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	24 buku	24 buku	12.310	24 buku	12.310	24 buku	12.310	24 buku	12.310	24 buku	12.310		
			2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	4 buku	4 buku	5.515	4 buku	5.515	4 buku	5.515	4 buku	5.515	4 buku	5.515		
			3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	4 buku	4 buku	18.149	4 buku	18.149	4 buku	18.149	4 buku	18.149	4 buku	18.149		
			4. Penyusunan rencana kerja OPD	Tersusun dan tersedianya rencana kerja OPD	2 kegiatan	2 kegiatan	10.000	2 kegiatan	10.000	2 kegiatan	10.000	2 kegiatan	10.000	2 kegiatan	10.000		
			5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD	Tersusun rencana kerja dan anggaran OPD	2 kegiatan	2 kegiatan	50.260	2 kegiatan	50.260	2 kegiatan	50.260	2 kegiatan	50.260	2 kegiatan	50.260		
			6. Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKjIP) OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKjIP) OPD	15 buku	15 buku	14.700	15 buku	14.700	15 buku	14.700	15 buku	14.700	15 buku	14.700		

2	Meningkatkan terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal (PAUDNI) yang merata, terjangkau dan bermutu	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program:			0,84		0,9		0,9									
			Pendidikan Anak Usia Dini																
			1) APK PAUD	63,50%	64%		65%		66%		67%		68%		69%				
			2) % lembaga PAUD yang terakreditasi	48,70%	50,00%		51,30%		52,60%		53,90%		55,19%		56,49%				
			Kegiatan:																
			Pengembangan pendidikan anak usia dini	1) meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	100	71 TK	35.000	2	38.500		40.425	2	42.446	2	44.568	2	46.796		
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	2) terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang baik	100	100 Lembaga PAUD	7.700	100 Lembaga PAUD	12.000	100	12.600	100 Lembaga PAUD	13.230	100 Lembaga PAUD	13.891	100 Lembaga PAUD	14.585		
			Lomba Semarak Anak Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	3) motivasi anak meningkat	12	lomba	0	12	70.000	12	73.500		77.175		75.033		78.784		
			Lomba bercerita/mendongeng guru TK	4) Peningkat mutu pendidikan PAUD formal dan non formal	1	1 TK	20.240	1	20.240	1	21.252	1	22.314	1	23.429	1	24.600		
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat	Pendidikan Non formal	1) Angka melek huruf	96,02%	96,35%		96,67%		96,99%		97,31%		97,63%		97,95%		
	2) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	97%			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	3) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	95%			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	4) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	90%			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	5) usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	60%			54%		60%		60%		62%		63%		64%				
	6) persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	9%			6%		9%		9%		10%		10%		10%				
	7) persentase lembaga PNF terakreditasi c.	2,85%			5%		10%		15%		20%		25%		30%				
	8) Jumlah model layanan PNF Unggulan	5%			3%		5%		5%		5%		5%		5%				
	9) Prosentase peningkatan peserta MTQ Kota	275			282		296		304		319		319		319				
	10) Jumlah juara FASI	NA			3		-		4		-		-		-				
	11) Jumlah juara MTQ	1	1	1		1		1		2		2		2					
Kegiatan:																			
Pelaksanaan UN Paket C	Terlaksananya Pra UN kesetaraan	170	170	14.000	170	15.400	170	16.170	170	16.978	170	17.826	170	18.717					

	Terlaksananya Pra UNPK	120	120	15.000	120	15.750	120	15.750	120	16.537	120	17.363	120	18.231
Pelaksanaan Pra UNPK														
	warga bebas buta aksara	2		12.992		14.291		15.720		16.506		17.331		18.197
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan			kegiatan		2		2		2		2		2	
	terlaksananya UNPK	290		22.978	290	95.000	290	99.750	290	16.170	290	16.170	290	16.170
Pelaksanaan UN Paket B dan C			warga belajar											
	Terlaksananya Pendataan Lembaga PAUD Kota Magelang	200		20.000		20.000		21.000		22.050		23.152		24.309
Pendataan Lembaga PAUD			lembaga		250		250		250		250		250	
	Terlaksananya replikasi kelurahan vokasi	2		80.000		90.000		94.500		16.170		16.170		16.170
Replikasi kelurahan Vokasi			kelurahan		2		2		2		2		2	
	Terlaksananya Kegiatan Kursus di PKBM dengan baik	3		47.440	3	46.500	3	48.825	3	51.266	3	53.829	3	56.520
Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan			pkbm											
	Meningkatnya Pendidikan Orang tua Anak Didik	240		0		25.000		26.250		27.562		28.940		30.387
Pelatihan Program Parenting Education bagi pendidik PAUD			orang		190		190		175		175		175	
	Meningkatkan SDM Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	60		72.053	60	90.000	60	94.500	60	99.225	60	104.186	60	109.935
Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup			Warga belajar pendidikan keaksaraan											
	Meningkatnya mutu pelayanan PKBM	4		40.000		40.000		42.000		44.100		46.305		48.620
Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM			lembaga		4		4		3		3		3	
	peningkatan SDM pengelola kursus	120		90		40.000		42.000		44.100		46.305		48.620
Pelatihan kursus			pengelola		37577		90		60		60		60	
	terlaksananya penyelenggaraan paket C	3		220.000	3	226.000		248.600						
Penyelenggaraan Paket C setara SMU			kelompok				3		3	260267	3	270000	3	275000

3	Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Dasar (DIKDas) yang bermutu, merata dan terjangkau	2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)	Program:																			
			Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Wajib Belajar																			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,61%		97,61%		98,61%		99,61%		100%		100%		100%						
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,62%		75%		76%		78%		80%		82%		84%						
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,15%		110,00%		112%		114%		116%		118%		120%						
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81,92%		82,00%		85%		88%		90%		96%		100%						
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1:136		1:136		1:136		1:136		1:136		1:136		1:136					
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 12 - 15	1:290	1:290		1:290		1:290		1:290		1:290		1:290		1:290					
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16		1:16		1:16		1:16		1:16		1:16		1:16					
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14		1:14		1:14		1:14		1:14		1:14		1:14					
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01						
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,38		0,27		0,18		0,13		0,04		0,04		0,04						
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	149,34%	149,50%			150%		150%		150%		150%		150%						
			Presentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar dikdas 9 tahun	0,002	0,002			0,002		0,002		0,002		0,002		0,002						
			persentase sekolah yang menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	50,00%	55,00%			60%		65%		70%		75%		80%						
			Penurunan angka kenakalan pelajar	54 pelajar	50 pelajar			46 pelajar		42 pelajar		36 pelajar		30 pelajar		24 pelajar						
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai disetiap sekolah	81,00%	83,00%			85%		87%		90%		93%		95%						
			Persentase sarana prasarana pendidikan yang memenuhi universal design		10,00%			20%		30%		40%		50%		60%						
			Kegiatan:																			

			1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Tersedianya sarana prasarana pendidikan SMP	3 rkb, 10 rehab, 8115 buku, alat pendidikan	3 rkb, 10 rehab, 8115 buku, alat pendidikan	1.463.421		1.883.900		1902000						
			2. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/ MI/ SDLB (DAK)	tersedianya sarana pendidikan SD/MI/SDLB	10		4.294.967		4.509.715		4.735.200		4.371.960		4.590.558		4.820.085
			3. Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD	bantuan untuk SD/MI/SDLB		SD = 61 sekolah	3.780.449		22.246.464		23.358.787		24.526.726		25.753.062		27.040.715
				bantuan untuk SMP/MTs/SMPLB		SMP = 13 sekolah			11.381.708								
			4. Penyelenggaraan paket B setara SMP	Warga belajar paket B naik kelas dan memiliki pengetahuan	6	6	200.000	5	204.000	5	214.200	6	224.910	6	236.155	6	247.962
			5. Penyelenggaraan paket A setara SD	Warga belajar Paket A setara SD	6	6	0	4	70.000	4	73.500	6	77.175	6	81.033	6	85.084
			6. Tes pengendali mutu SD	terpilihnya siswa berkualitas	2500	2500	25.000	2500	153.019	2500	160.669	2500	168.702	2500	177.137	2500	185.993
			7. Tes pengendali mutu SMP	terpilihnya siswa berkualitas	3320	3320	40.000	3320	194.572	3320	204.300	3320	214.515	3320	225.240	3320	236.502
			8. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terinformasinya pendidikan kepada sekolah dan masyarakat	208	208	50.000	100	51.845	100	54.437	208	57.158	208	60.015	208	63.015
			9. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	proses belajar mengajar lancar	5		220.000	6	377.955	6	377.955	6	377.955	6	377.955	6	377.955
			10. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Taman dilingkungan sekolah	30	30	350.000	30	385.000	30	204.000	30	214.200	30	224.910	30	236.155
			11. Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya Pelaksanaan Kurikulum Baru	220	tenaga pendidik	60.000	220	66.000	220	204.000	220	4.735.200	220	4.735.200	220	4.735.200
			12. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehabilitasi bangunan sekolah	6		0	6	883.720	6	927.606	6	973.986	6	1.022.685	6	1.073.819
			13. Pengadaan mebelur sekolah	tersedianya mebelur		13	260.000	13	260.000	13	273.000						
			14. Penyelenggaraan pendidikan SD Negeri Kota Magelang	terlaksananya wajar dikdas untuk siswa Sekolah Dasar	0	0	0	61	4.943.000	61	4.943.000	61	4.943.000	61	4.943.000	61	4.943.000
			15. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota Magelang	terlaksananya wajar dikdas untuk siswa Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	13	8.963.422	13	8.963.422	13	8.963.422	13	8.963.422	13	8.963.422
			16. Manajemen pengelolaan bantuan operasional sekolah	terlaksananya pendidikan yang baik	96	96 sekolah	50.000	96	50.000	96	22.247	96	22.247	96	22.247	96	22.247
4	Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan	Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan	Program:														
			Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus	1	85%		100%		100,00%							

	Rasio guru / murid	0,0625	0,056		0,063		0,063								
	Rasio guru / murid per kelas rata-rata	0,0625	0,058		0,063		0,063								
	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,01%	35,50%		35,75%		35,50%		35,75%		36,00%		36,25%		
	Guru PAUD bersertifikat pendidik	13,11%	14,05%		14,23%		14,05%		14,23%		14,40%		14,53%		
	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,56%	85%		86%		85%		86%		87%		88%		
	Guru SD bersertifikat pendidik	52,23%	53,15%		54,15%		53,15%		54,15%		54,65%		55,15%		
	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,89%	95,10%		95,20%		95,10%		95,20%		95,30%		95,40%		
	Guru SMP bersertifikat pendidik	66,67%	67,67%		67,97%		67,67%		67,97%		68,17%		68,67%		
	Presentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	50,00%	55,00%		60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		
	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	1	75%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	10	7		10		10								
	Kegiatan:														
	2. Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal	terpilihnya tenaga pendidik formal yang kompeten untuk mewakili di tingkat provinsi	100	100	50.000	119	108.000	119	113.400	119	119.070	119	125.023	119	131.274
	3. Pelaksanaan sertifikasi pendidik	350 guru mendapat sertifikasi	325	325	80.000	100	50.000	100	52.500		55.125		57.881		60.775
	4. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tenaga pendidik memperoleh bantuan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan	80	80	80.000	80	80.000	80	80.000	80	80.000	80	80.000	80	80.000
	5. Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	terpilihnya tenaga pendidik non formal yang kompeten untuk mewakili di tingkat provinsi	100	100	25.000	10 orang	60.000	10	63.000	10	66.150	10	69.457	10	72.929
	6. Nasionalisme dan Karakter bangsa melalui jalur pendidikan	Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan pelajar	5	5 kegiatan	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
	7. Manajemen pendataan pegawai	meningkatnya kemampuan pendataan pegawai	2 kegiatan	2 kegiatan	32.000	2	35.200	2	36.960	2	38.808	2	40.748	2	42.785
	8. Workshop manajemen perencanaan terpadu	meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	250	250 orang	200.000	250 orang	198.511	250	208.436	250 orang	218.857	250 orang	229.799	250 orang	235.288
	9. Pelatihan pembina olimpiade SAINS	peningkatan kemampuan dan pengetahuan	100	100	45.000	100	66.000	100	69.300	100	72.765	100	76.403	100	80.223
	10. Pendataan dan entri nilai peserta Ujian Nasional	Pencapaian data yang valid untuk Peserta Ujian sekolah	2	140 Sekolah	0	140 Sekolah	40.000	140	42.000	140 Sekolah	44.100	140 Sekolah	46.305	140 Sekolah	48.620
	11. Pembinaan KKPS	meningkatnya kompetensi pengawas sekolah	100	25 orang	0	100	30.000	100	31.500	25 orang	33.075	25 orang	34.728	25 orang	36.464
	12. Pembinaan MGMP SMA	peningkatan kompetensi guru sma	100		0	100	0	100	0		0		0		0
	13. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kompetensi guru tk&sd	100	360 orang	41.055	100	360.000	100	378.000	360 orang	396.900	360 orang	416.745	360 orang	437.582
	14. Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya MGMP SMP	100	1 Kegiatan	0	100	280.000	100	294.000	1 Kegiatan	302.700	1 Kegiatan	324.135	1 Kegiatan	340.341
	15. Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga pendidikan	13	13	0	100	65.000	100	68.250	100	71.662	100	75.245	100	79.007
	16. Pelatihan manajemen aset	Meningkatnya kemampuan pengelolaan aset	100 Sekolah	100 Sekolah	19.460	100 Sekolah	21.406	100 Sekolah	23.000	100 Sekolah	24.500	100 Sekolah	25.650	100 Sekolah	27.500
	17. Koordinasi pengurus barang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Magelang	Terkoordinasinya pengurus barang	100 Sekolah	100 Sekolah	19.093	100 Sekolah	21.002	100 Sekolah	23.500	100 Sekolah	25.200	100 Sekolah	26.350	100 Sekolah	28.505

			18. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	2 kegiatan	2 kegiatan	180.000	2 kegiatan	191.683								
5	Mendorong terwujudnya minat baca masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat	Program:														
			Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	1.457	1.815		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				Persentase perpustakaan yang memenuhi standar	70%	75%		80%		85%		90%		95%		100%	
6	Mendorong terwujudnya karakter kebangsaan di bidang pendidikan	Meningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti Insan Pendidikan	Program :														
			Program pendidikan berkelanjutan														
7	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya.	Terwujudnya masyarakat yang apresiatif serta terlibat dalam usaha pelestarian dan pengembangan seni budaya peninggalan purbakala	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	unit	1		1		1		1		2		2	
				Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	10		11		12		13		14		14	
				Cakupan kajian seni 50%	%	73		73		73		80		80		80	
				Cakupan fasilitas seni 30%	%	100	167.700	100	736.200	100	504.610	100	500.952	100	576.094	100	662.508
				Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	%	75		75		100		100		100		100	
				Cakupan tempat 100%	%	100		100		100		100		100		100	
				Cakupan organisasi 34%	%	100		100		100		100		100		100	
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di kampung	lokasi	5	167.700	10	211.200	10	197.610	10	227.252	10	261.339	10	300.540
			Sosialisasi Pakaian Adat Magelangan	Tersosialisasinya pakaian adat pengantin magelangan	Kegiatan	0	0	1	65.000	1	70.000	1	80.500	1	92.575	1	106.461
			Fasilitasi pelatihan seni dan budaya	Terfasilitasinya pelatihan seni dan budaya (panembromo, permadani, pedalangan, dll)	kegiatan	0	0	2	40.000	2	45.000	2	51.750	2	59.513	2	68.439
			Festival wayang anak	Terselenggaranya festival wayang anak	Kegiatan	0	0	1	90.000	1	100.000	1	115.000	1	132.250	1	152.088
			Pemeliharaan Pendopo Mantyasih	Kebersihan, keamanan, pemeliharaan Pendopo Mantyasih	paket	0	0	1	20.000	1	23.000	1	26.450	1	30.418	1	34.980
			Pengelolaan Keragaman Budaya														
				Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	%	14,41	1.735.052	14,86	2.295.018	15,32	2.200.359	15,77	2.513.330	16,22	2.871.283	16,67	3.280.738
				Jumlah festival seni dan budaya.	kali	10		11		12		13		14		14	
				Cakupan gelar seni 75%	%	32		35		37		3		41		45	
			<i>Malam resepsi HUT RI</i>	2. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kegiatan	1	89.524	1	111.040	1	104.129	1	119.748	1	137.710	1	158.366

	Malam resepsi Tahun Baru	Pentas Musik Nasional	Kegiatan		1	437.738	1	488.078	1	544.207	1	606.791	1	676.572	
	Pameran Magelang Tempo Dulu	5. Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	Kegiatan	1	381.571	1	229.692	1	60.987	1	70.135	1	80.656	1	92.754
	Grebeg Gethuk	1. Pekan seni dan budaya daerah	Kegiatan	3	756.818	1	378.408	1	435.169	1	500.445	3	575.511	3	661.838
	Kirab Budaya						89.739	1	103.200		118.680		136.482		156.954
	Festival Tidar						484.577	1	557.264		640.853		736.981		847.528
	Pentas seni gunung tidar & manyasih	8. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Kelurahan	17	62.000	12	68.220	12	67.851	12	78.029	12	89.733	12	103.193
	Pagelaran wayang	3. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Kegiatan	1	228.305	1	368.344	1	246.187	1	283.115	1	325.583	1	374.420
	2. Lomba kesenian dan kebudayaan	Berkembangnya nilai budaya daerah	Kegiatan	0	0	2	60.000	2	65.000	2	74.750	2	85.963	2	98.857
	4. Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Dialog Budaya	Kegiatan	2	205.390	2	55.000	2	60.000	2	69.000	2	79.350	2	91.253
	6. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Profil Budaya	Kegiatan	1	11.444	1	12.260	1	12.495	1	14.369	1	16.525	1	19.003
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100		100		100		100		100		100	
		Jumlah pengunjung museum	Orang	5.050	108.031	5.150	792.214	5.250	321.244	5.350	233.563	5.450	268.597	5.600	308.887
		Jumlah koleksi museum	buah	10		11		12		13		14		15	
	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Sistem Register CB	Kegiatan	1	60.075	1	60.885	1	24.119	1	24.119	1	27.737	1	31.897
		Sertifikasi TACB	Orang	0	0	7	125.000	0	0	0	-	0	-	0	0
	Perekaman dan digitalisasi Bahan Pustaka	Film Dokumenter	Kegiatan	0	0	1	98.367	1	101.479	1	116.701	1	134.206	1	154.337
	Pemeliharaan Museum	Terpeliharanya kondisi museum, foto dan dokumen sejarah, dan partisipasi dalam pameran museum	Tahun	1	47.956	1	43.132	1	44.628	1	51.322	1	59.020	1	67.873

		Rehabilitasi museum & pembangunan pendopo baca, pembangunan pusat informasi sejarah	unit	0	0	3	90.000	1	90.000	0	-	0	-	0	0
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Buku, lukisan, poster Sejarah Kota Magelang	Kegiatan	0	0	40	359.830	40	36.018	40	41.421	40	47.634	40	54.779
	10. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Perwal	Perwal	0	0	1	15.000	0	0	0	-	0	-	0	-
	5. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Perda	Perda	0	0	0	0	1	25.000	0	-	0	-	0	-
	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya														
		Meningkatnya jumlah kelompok seni dan budaya	kelompok	222	524.767	223	544.990	225	1.078.251	227	1.239.988	229	1.425.987	231	1.639.885
		Misi kesenian 100%	%	100		100		100		100		100		100	
	<i>Pentas Seni APEKSI</i>	1. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Kegiatan	1	266.369		231.507		271.567		312.302		359.147		413.019
	<i>Kemah Budaya</i>	9. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kegiatan	1	40.000	1	21.404	1	40.837	1	46.962	1	54.006	1	62.107
	<i>Pentas seni di PRPP</i>	3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kegiatan	1	37.735	1	57.386	1	46.773	1	53.789	1	61.857	1	71.136
	<i>Pengiriman duta seni ke TMI</i>	1. Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kegiatan	1	120.663	1	115.510	1	121.286	1	139.478	1	160.400	1	184.460
	<i>Pengiriman duta seni ke Gwbn</i>		Kegiatan	0	0	0	0	1	271.567	1	312.302	1	359.147	1	413.019
	<i>Pengiriman duta seni ke Parade Budaya Tk. Provinsi</i>	3. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Kegiatan	1	60.000	1	119.183	1	204.937	1	235.677	1	271.029	1	311.683
	<i>Pengiriman duta seni ke luar daerah</i>		Kegiatan	0	0	0	0	1	121.286	1	139.478	1	160.400	1	184.460

TABEL 5.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJM-D (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			TARGET	Rp											
Pendidikan				23.103.395.000		36.433.846.000		32.090.591.000		31.629.882.000		36.188.974.000		36.195.457.000	
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.684.284.000		1.166.397.000		949.177.000		949.177.000		500.000.000		500.000.000	
1	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional	40	42		44		46		48		50		52		52
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini			2.812.379.000		495.113.000		527.289.000		495.113.000		495.113.000		495.113.000	
1	APK PAUD	89,98%											96%		96%
3	Program Pendidikan Non Formal			1.352.506.000		4.395.056.000		586.845.000		-		-		-	
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,38	0,27		0,18		0,13		0,04		0,04		0,04		0,04
3	Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	50%	55%		60%		65%		70%		75%		80%		80%
4	Penurunan jumlah kenakalan pelajar	54 pelajar	50 pelajar		46 pelajar		42 pelajar		36 pelajar		30 pelajar		24 pelajar		24 pelajar
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			2.528.425.000		1.539.161.000		1.539.161.000		1.539.161.000		1.539.161.000		1.539.161.000	
1	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,01%	35,50%		35,75%		35,50%		35,75%		36,00%		36,25%		36,25%
2	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	13,11%	14,05%		14,23%		14,05%		14,23%		14,40%		14,53%		14,53%
3	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,56%	85%		86%		85%		86%		87%		88%		88,00%
4	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	52,23%	53,15%		54,15%		53,15%		54,15%		54,65%		55,15%		55,15%
5	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,89%	95,10%		95,20%		95,10%		95,20%		95,30%		95,40%		95,40%
6	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	66,67%	67,67%		67,97%		67,67%		67,97%		68,17%		68,67%		68,67%
7	Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	50,00%	55%		60%		65%		70%		75%		80%		80%
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1.901.454.000		1.667.952.000		1.667.952.000		1.667.952.000		1.667.952.000		1.667.952.000	
1	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	30%	35%		40%		45%		50%		55%		60%		60%

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJM-D (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			8.165.658.000		27.170.167.000		26.820.167.000		26.820.167.000		31.820.167.000		31.820.167.000	
1	Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1:136		1:136		1:136		1:136		1:136		1:136		1:136
2	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	1:290		1:290		1:290		1:290		1:290		1:290		1:290
3	Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16		1:16		1:16		1:16		1:16		1:16		1:16
4	Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14		1:14		1:14		1:14		1:14		1:14		1:14
5	APK SD/SDLB/MI/Paket A	128,57%	129,00%		130%		131%		132%		133%		134%		134%
6	APM SD/SDLB/MI/Paket A	115,04%	116,00%		117%		118%		119%		120%		121%		121%
7	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	163,99%	164,00%		165%		166%		167%		168%		169%		169%
8	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	119,02%	120,00%		121%		122%		123%		124%		125%		125%
9	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002											0,001		0,001
10	Angka Melanjutkan SD ke SMP	149,34%	149,50%		150%		150%		150%		150%		150%		150%
11	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	151,31%	153%		155%		157%		160%		163%		165%		165%
12	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,02%	96,35%		96,67%		96,99%		97,31%		97,63%		97,95%		98%
13	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	81,00%	83,00%		88%		90%		92%		94%		97%		97%
14	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	95,00%	95,00%		96%		97%		98%		99%		100%		100%
15	Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	0,00%	15%		30%		45%		60%		75%		90%		90%
16	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berakar budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	NA	-		80%		85%		90%		95%		100%		100%
17	Adanya kurikulum baru muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berakar bagi siswa	NA	-		1		1		1		1		1		1
18	Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	81%	83%		85%		87%		90%		93%		95%		95%
19	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	NA	10%		20%		30%		40%		50%		60%		60%

URUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN	DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJM-D (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				TARGET	Rp	TARGET	Rp									
Kebudayaan					2.462.012.000		2.789.566.000		4.279.381.000		4.874.624.000		5.465.814.000		332.136.000	
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				287.873.000		406.137.000		289.918.000		303.824.000		319.695.000		332.136.000	
	1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100		100		100		100		100		100		100
	2	Jumlah pengunjung museum	5.000	5.050		5.150		5.250		5.350		5.450		5.600		5.600
	3	Jumlah koleksi museum	9	10		11		12		13		14		15		15
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.590.300.000		1.291.346.000		2.200.359.000		2.513.330.000		2.871.282.000		-	
		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,96	14,41		14,86		15,32		15,77		16,22		16,67		16,67
		Jumlah festival seni dan budaya.	10	10		11		12		13		14		14		14
	5	Cakupan gelar seni 75%	100,00%	100		100		100		100		100		100		100
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				266.369.000		617.645.000		1.284.494.000		1.477.169.000		1.698.744.000		-	
	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	222	222		223		225		227		228		230		230
	6	Misi kesenian 100%	100,00%	35		38		39		43		45		50		50
4	Program Pengembangan Nilai Budaya				317.470.000		474.438.000		412.610.000		474.501.000		545.676.000		-	
	1	Jumlah gedung kesenian	1	1		1		1		1		2		2		2
	2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	9	10		11		12		13		14		15		15

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA TIAP TAHUN						TRANSISI 2022
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fokus Urusan Wajib Pelayanan								
a	Bidang Pendidikan								
	Rasio Sekolah Dikdas terhadap penduduk usia sekolah Dikdas	1:136	1:136	1:136	1:136	1:136	1:136	1:136	1:136
	Rasio guru terhadap murid	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16
	APK SD/SDLB/MI/Paket A	128.57%	129.00%	130.00%	131.00%	132.00%	133.00%	134.00%	135.00%
	APM SD/SDLB/MI/Paket A	115.04%	116.00%	117.00%	118.00%	119.00%	120.00%	121.00%	122.00%
	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	163.99%	164.00%	165.00%	166.00%	167.00%	168.00%	169.00%	170.00%
	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	119.02%	120.00%	121.00%	122.00%	123.00%	124.00%	125.00%	126.00%
	APK PAUD	63.88%	64.00%	65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%
	Angka Putus Sekolah SD/MI	1.34%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	37.79%	26.99%	22.49%	17.99%	13.50%	9.00%	4.50%	4.50%
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	149.34%	149.50%	149.55%	150.00%	150.00%	150.00%	150.00%	150.00%
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	151.31%	153.00%	155.00%	157.00%	160.00%	163.00%	165.00%	170.00%
	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.02%	96.35%	96.67%	96.99%	97.31%	97.63%	97.95%	98.27%
	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.01%	35.05%	35.25%	35.50%	35.75%	36.00%	36.25%	36.50%
	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83.56%	83.56%	84.00%	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%
	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94.89%	94.89%	95.00%	95.10%	95.20%	95.30%	95.40%	95.55%
	Persentase Guru PAUD bersertifikat	13.11%	13.65%	13, 87%	14.05%	14.23%	14.40%	14.53%	14.70%
	Persentase Guru SD bersertifikat	52.23%	52.65%	53.15%	53.15%	54.15%	54.65%	55.15%	55.65%
	Persentase Guru SMP bersertifikat	66.67%	66.97%	67.17%	67.67%	67.97%	68.17%	68.67%	68.97%
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal	81.00%	83.00%	88.00%	90.00%	92.00%	94.00%	97.00%	100.00%
	Persentase SMP/MTS berakreditasi	95.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%	100.00%
	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%
	Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informai	0.00%	0.00%	20.00%	35.00%	50.00%	65.00%	80.00%	100.00%

b	Bidang Kebudayaan								
	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengunjung museum	5.000	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450	5.600	5.600
	Jumlah koleksi museum	9	10	11	12	13	14	15	15
	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,96%	14,41%	14,86%	15,32%	15,77%	16,22%	16,67%	16,67%
	Jumlah festival seni dan budaya.	10	10	11	12	13	14	14	14
	Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	222	222	223	225	227	228	230	230
	Misi kesenian 100%	100%	35%	38%	39%	43%	45%	50%	50%
	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	2	2	2
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	9	10	11	12	13	14	15	15
	Cakupan kajian seni 50%	73%	73%	73%	73%	80%	80%	80%	80%
	Cakupan fasilitas seni 30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan tempat 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%